

# **PERSPEKTIF MANAJEMEN ISLAM DALAM MENGHADAPI RESIKO TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**Ismail, Fachruddin Azmi**

Manajemen Pendidikan Islam, FITK, UIN SU, Indonesia

Corresponding e-mail:

ismail.ahmad0512@gmail.com

**RINGKASAN** - Praktik manajemen risiko Islam yang telah menunjukkan bahwa saat ini tidak ada kerangka manajemen risiko Islam yang sesuai dengan persyaratan bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan Islam. Ketidakpastian mengenai struktur manajemen risiko Islam inilah menjadi sedikit dasar dalam penulisan makalah ini. Hal inilah yang menjadi kajian dalam tulisan ini, konsep manajemen risiko di teliti di Kantor Kemenag Tapanuli Tengah. Implementasi manajemen risiko tersebut dilihat implementasinya pada transparansi informasi public. tujuan penelitian dalam mini research ini yakni; a) Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko di Kemenag Tapanuli Tengah, b) Untuk mengetahui perspektif manajemen islam dalam menghadapi risiko transparansi publik. Transparansi informasi dalam pelayanan publik merupakan keniscayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan adanya pelayanan yang baik akan memberikan kesan baik pula terhadap organisasi

**Kata Kunci : Manajemen Organisasi Islam, Pelayanan public, Transparansi publik**

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya suatu lembaga merupakan subyek sejumlah risiko, oleh karena itu kegagalan sesuatu yang lumrah terjadi. Dengan demikian manajemen risiko dapat menciptakan nilai perusahaan, upaya suatu lembaga menghasilkan keuntungan merupakan salah satu indikator kinerja manajemen, sehingga nilai suatu lembaga dapat di pandang juga dari aspek kinerja manajemen. Perspektif Islam bahwa kinerja manajemen syari'ah dibagi dalam tiga perspektif, yaitu: (1) kesalehan keuangan, (2) kesalehan mental dan sosial, dan (3) kesalehan spiritual, ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan. Pengukuran kinerja melintasi batas dunia materi, dapat memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Berdasarkan hal

ini bahwa perusahaan-perusahaan di sektor riil telah melakukan manajemen risiko secara besar-besaran dan terbuka (*go public*), guna mengetahui keterkaitan antara manajemen risiko dengan penciptaan nilai perusahaan.

Kehadiran risiko dalam hidup, dalam segala bentuk dan asal-usulnya yang segudang, merupakan komponen tak terpisahkan dari setiap usaha. Ini karena fakta bahwa sangat sulit untuk membuat prediksi yang akurat tentang masa depan. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat mengatakan dengan kepastian mutlak apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan sedetik pun. Selalu ada beberapa variabel yang tidak dapat diprediksi, yang menghasilkan risiko. Etika dalam suatu lembaga Islam menjadi sistem evaluasi dan sekaligus merupakan akhlak dalam menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam. tujuannya adalah agar melaksanakan lembaga organisasi tidak perlu ada kekhawatiran, sebab diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

Fakta bahwa praktik manajemen risiko Islam memang ada menunjukkan bahwa belum ada kerangka kerja manajemen risiko Islami yang sesuai dengan persyaratan bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan Islam. Karena kurangnya kejelasan yang ada dalam kerangka manajemen risiko Islam, penulisan makalah ini terinspirasi oleh kekurangan tersebut. Bagian tersebut menjadi acuan dalam artikel bahwa konsep manajemen resiko di teliti diantor Kemenag Tapanuli Tengah. Implementasi manajemen resiko tersebut dilihat implementasinya pada transparansi informasi public.

Oleh karenanya terdapat masalah dalam mini riset yang sudah dilakukan diantaranya adalah; a) Bagaimana manajemen resiko di Kemenag Tapanuli Tengah dan b) Bagaimana perspektif manajemen islam dalam menghadapi resiko transparansi publik.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Manajemen Resiko Perspektif Umum**

Sebagai suatu bahan perbandingan bahwa perlu dalam penelitian ini mengkaji sedikit tentang konsep manajemen resiko sehingga dapat dijadikan sebagai dasar atau indikator perbedaan. Pada dasarnya risiko selalu dihubungkan juga dengan ketidakpastian. Sebuah organisasi memiliki pilihan untuk melakukan

manajemen risiko dengan salah satu dari dua cara yang berbeda secara fundamental, yaitu: (1) mengelola satu jenis risiko pada satu waktu (dari perspektif tradisional atau berbasis silo); atau (2) mengelola semua risiko secara holistik (dari perspektif perusahaan, terintegrasi, atau strategis).

Dalam hal ini konsep manajemen risiko dapat dimaknakan sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengajak kita untuk secara logis, konsisten dan sistematis melakukan pendekatan terhadap ketidakpastian masa depan. Tujuannya adalah agar memungkinkan kita untuk secara lebih hati-hati dan produktif menghindari hal-hal yang tidak berguna karena membuang sumber daya secara tidak perlu dan mencegah hal-hal yang merugikan atau bahkan meraup dan mengejar hal-hal yang bermanfaat.

Pada dasarnya manajemen risiko Membuat keputusan yang baik dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko mungkin dimulai pada awal keberadaan manusia. Maka dinamika kehidupan manusia dalam organisasi baik ketika mampu menggunakan pengalaman dan pikiran mereka untuk mengurangi ketidakpastian dalam menghadapi problema dalam memajukan lembaga yang dikelola. Oleh karena itu maka pengelolaan terhadap resiko dalam lembaga atau organisasi merupakan suatu kemestian dan kenyataan empiris. Sebagai suatu penekanan dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya tuntutan yang kompleks terhadap organisasi karena semakin berkembangnya dunia dalam peningkatan aktivitas dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Tentu pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi oleh lembaga, maka implementasi manajemen risiko menjadikan sasaran utama untuk melindungi lembaga pendidikan terhadap berbagai problema yang mungkin timbul.

Untuk merealisasikan dari perencanaan tersebut tentu dihadapkan dengan berbagai resiko yang mengganggu keberadaan organisasi tersebut. Secara umum ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab. Adapun sebab tersebut antara lain:

- a. Tenggang waktu antar perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, dimana semakin panjang tenggang waktunya semakin besar pula ketidakpastiannya.
- b. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana.
- c. Keterbatasan pengetahuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencanaan. Jika saja suatu risiko sudah dapat diketahui secara pasti bentuk dan besarnya maka tentu saja ini dapat diperlakukan seperti biaya karena risiko merupakan suatu ketidakpastian maka akan menjadi suatu masalah penting bagi semua pihak.

Istilah risiko mungkin tidak akan muncul apabila aktifitas-aktifitas yang dilakukan berjalan baik. Maka manajemen risiko tersebut ditujukan untuk memastikan kesinambungan, profitabilitas dan pertumbuhan usaha sejalan dengan visi dan misi lembaga. Pelaksanaan Manajemen risiko dilakukan dengan prosedur sesuai mutu lembaga, maka dalam hal ini proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko dan evaluasi risiko. Maka dalam implementasinya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. Risiko merupakan sesuatu yang akan diterima atau ditanggung oleh seseorang sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan. Risiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang dicapai.

## **2. Risiko Dalam Pandangan Islam**

Secara umum, Islam menganggap risiko sebagai kesulitan yang tidak diinginkan demi keberadaannya sendiri. Hanya ketika ia memiliki manfaat yang lebih besar daripada biaya yang terkait dengan penderitaan, itu diinginkan; dengan kata lain, risiko hanya diinginkan ketika mereka dapat berfungsi sebagai stimulus untuk usaha produktif dan kegiatan yang menambah nilai. Penderitaan hanya diinginkan ketika mengandung manfaat yang lebih besar daripada biaya yang terkait dengan penderitaan. Ada hubungan antara risiko dan keberuntungan dalam Islam. Jika rejeki dikaitkan dengan perolehan rezeki, maka ada sepuluh kunci pembuka rezeki menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang harus dijalani dan

diyakini agar seseorang memperoleh rejeki (rejeki) dan memperoleh rezeki itu. adalah halal dan baik. Risiko dan keberuntungan sama-sama terkait dengan perolehan rezeki. seperti firman Tuhan, berkat. Karena risiko dapat dimitigasi melalui penerapan prosedur manajemen risiko, Islam dapat dibagi menjadi dua kategori dalam konteks ini: (1) risiko akhirat dan (2) risiko dunia.

Kehadiran risiko dalam hidup, dalam segala bentuk dan asal-usulnya yang segudang, merupakan komponen tak terpisahkan dari setiap usaha. Ini karena fakta bahwa sangat sulit untuk membuat prediksi yang akurat tentang masa depan. Tak seorang pun di dunia ini yang dapat mengatakan dengan kepastian mutlak apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan sedetik pun. Selalu ada beberapa variabel yang tidak dapat diprediksi, yang menghasilkan risiko. Dalam situasi seperti ini, keterampilan manajemen risiko sangat penting. Ada banyak pendekatan berbeda untuk manajemen risiko, termasuk yang berikut:

### **3. Hindari risiko**

Menolak untuk memiliki, menerima, atau melakukan aktivitas, meskipun hanya sementara, dan mengembalikan risiko yang telah diterima atau segera menghentikan aktivitas segera setelah diketahui mengandung risiko adalah dua cara untuk mengendalikan risiko murni. Cara lain untuk mengendalikan risiko murni adalah dengan menghindari mengekspos properti, orang, atau aktivitas pada risiko dengan mencegah mereka terpapar risiko.

### **4. Kontrol kerugian.**

Tindakan yang diambil untuk mencegah kerugian dengan mencoba menggambarkan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. Potensi keparahan kerugian adalah salah satu fokus utama program pengurangan kerugian.

### **5. Menjauhkan diri,**

Pemisahan dilakukan untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Pemisahan mengambil bentuk menyebabkan aset yang terkena risiko yang sama untuk menggantikan aplikasi di satu lokasi. Misalnya, perusahaan taksi dapat menempatkan kendaraan mereka di lebih dari satu lokasi secara bersamaan untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, tujuan pemisahan ini adalah untuk mengurangi jumlah cara yang berbeda di mana satu

peristiwa dapat mengakibatkan kerugian. Kemungkinan menderita kerugian akan berkurang sebagai akibat dari peningkatan tersebut. Oleh karena itu, upayakan peningkatan kapasitas perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian finansial.

#### **6. Kombinasi atau *pooling***

ialah acuan pada jumlah unit eksposur yang berada dalam batas kendali perusahaan yang sedang dipertimbangkan, dengan tujuan memungkinkan untuk memiliki gambaran yang lebih baik tentang kerugian yang akan terjadi untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh pertumbuhan internal perusahaan itu sendiri. Misalnya, sebuah perusahaan angkutan dapat meningkatkan jumlah truk yang digunakannya atau sebuah bisnis dapat digabungkan dengan yang lain. Di sisi lain, perusahaan asuransi dapat mengambil risiko sejumlah besar individu atau bisnis untuk menggabungkan risiko murni.

#### **7. Memindahkan**

Ada tiga cara berbeda agar risiko dapat dilakukan: pertama adalah melalui kepemilikan aset atau aktivitas yang berisiko diteruskan kepada pihak ketiga, baik secara terang-terangan maupun terselubung, melalui berbagai transaksi atau kontrak. Misalnya, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk menjual bangunannya, risiko yang biasanya terkait dengan kepemilikan bangunan akan secara otomatis dialihkan ke pemilik baru bangunan tersebut. Kedua, praktik pengalihan risiko, yang terjadi, misalnya, ketika pemilik rumah menyewakan dan menyerahkan tanggung jawab kepada penyewa atas segala kerusakan bangunan yang terjadi akibat kelalaian penyewa. Ketiga, transfer pembiayaan risiko dapat menempatkan penerima transfer pada posisi di mana mereka terkena kerugian. Pembatalan perjanjian oleh pihak yang menerima risiko dianggap sebagai metode ketiga untuk mengalihkan kendali atas risiko. Karena pembatalan ini, penerima pengalihan dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas kerugian, termasuk kerugian yang awalnya disepakati untuk dibayar.

Konteks di mana proses manajemen risiko diterapkan adalah konteks yang sama dengan konteks proses manajemen risiko. Ini termasuk tujuan dan strategi organisasi, serta ruang lingkup dan parameter aktivitas yang dilakukan organisasi, serta area lain di mana manajemen risiko diterapkan. Dalam melaksanakan

penerapan manajemen risiko, perlu mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat dari pelaksanaannya.

Oleh karena itu, menurut Islam, organisasi memiliki kewajiban untuk secara akurat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat keparahan konsekuensinya. Ketika melakukan analisis risiko, perlu untuk memperhitungkan tidak hanya konsekuensi potensial tetapi juga kemungkinan konsekuensi tersebut terjadi. Suatu peristiwa dapat memiliki berbagai efek, dan efek tersebut dapat memiliki efek pada tujuan dari sejumlah organisasi yang berbeda. Efektivitas pengendalian risiko yang diterapkan saat ini harus dievaluasi, dan pemeriksaan ini harus dimasukkan ke dalam analisis risiko. Cara menyatakan besarnya dampak dan besarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko, serta cara menggabungkannya untuk menentukan keseriusan risiko, akan berbeda-beda sesuai dengan jenis risiko yang sedang dipertimbangkan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji tentang manajemen Islam dalam pengelolaan resiko transfarasi informasi public di Kemenag Tapanuli Tengah. Maka dalam hal ini untuk memperoleh data digunakan metode kualitatif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Karena data penelitian lebih banyak berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, maka metode ini disebut juga dengan metode interpretatif. Strategi ini diperlukan untuk memahami kemandirian suatu program dalam kaitannya dengan hasil yang diperoleh, khususnya manfaat akhir yang mungkin dialami perusahaan dari waktu ke waktu.

Dalam bentuknya yang paling dasar, penelitian kualitatif dapat dirancang untuk memberikan kontribusi pada teori, praktik, kebijakan, masalah sosial, dan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, fenomena sosial atau lingkungan sosial—terdiri dari aktor, peristiwa, tempat, dan waktu—berfungsi sebagai titik awal penyelidikan dan penyelidikan lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata atau tindakan, serta dokumen-dokumen yang mendukung kebijakan tersebut. Sisa data terdiri dari sumber tambahan, seperti

dokumen dan lain-lain. Informan penelitian adalah orang-orang yang partisipasinya diperlukan agar informasi dapat diperoleh dengan tujuan mengungkap fenomena yang diperlukan.

Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah Subjek Penelitian ini adalah beberapa warga/pegawai Kemenag Tapanuli Tengah. memakai beberapa teknik pengumpulan data yang lazimnya digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu: Dokumentasi, Observasi dan Wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Temuan Umum Penelitian

Keberadaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah tidak bisa dilepaskan dari Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga. Pada awalnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di Kota Sibolga. Baru kemudian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah dibangun pada Tahun 1980 di Kota Pandan, dan diresmikan pada Tahun 1982 oleh Menteri Agama H. Munawir Sjadzali. Adapun Kepala Kantor yang menjabat pada saat itu adalah Bapak Hasanuddin Siregar. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu instansi vertikal yang berada di tingkat Kabupaten dan merupakan perpanjangan tangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara.

Dalam menjalankan kewajibannya, Kemenag Tapanuli Tengah memaparkan beberapa kebijakan di Kanwil Kemenag Propinsi Sumatera Utara dan juga menitikberatkan pada kebijakan Pemerintah daerah Tapanuli Tengah. Sejak awal berdiri Tahun 1980, kepemimpinan di Kantor Kementerian Agama Kab. Tapanui Tengah adalah sebagai berikut:

1. 1980 – 1986  
**Hasanuddin Siregar, BA**
2. 1986 – 1989  
**Drs. H. Agus Ahmad Siregar**
3. 1990 – 1993  
**Chairuddin Waruwu**



4. 1994 – 1998  
**Abdul Wahab Situmeang**
5. 1999 – 2003  
**Drs. H. Saifullah Sayman**
6. 2004 – 2006  
**Drs. Azwar Pohan, MM**
7. 2007 – 2010  
**Drs. H. Dur Brutu, MA**
8. 2011 – 2019  
**Dr. H. Sarmadan Nur Siregar, M.Pd**
9. 1 Februari 2019 s.d sekarang  
**Rasidin Barasa, MA**

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian pesat, sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah telah mencanangkan visi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Perlunya visi ini sebagai kompas bagi organisasi dan instansi untuk mengikuti mereka bergerak maju dalam beradaptasi dengan perubahan zaman adalah sesuatu yang tidak dapat dilebih-lebihkan.

Sebagai sarana perencanaan masa depan, visi organisasi atau instansi perlu disusun sedemikian rupa sehingga akan mengarah pada hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh organisasi atau instansi tersebut. Visi yang telah dirumuskan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Tapanuli Tengah Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “

Adapun Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan agama;
- c. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengembangan nilai-nilai agama dalam kehidupan beragama untuk kemajuan bangsa dan khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah
- d. Memperkokoh kerukunan umat beragama;

- e. Memberdayakan Lembaga Sosial Keagamaan dalam memajukan kesejahteraan umat beragama dan membina umat beragama serta meningkatkan mutu lembaga pendidikan keagamaan.

## **2. Manajemen Resiko di Kantor Kemenag Tapanuli Tengah**

Dilihat dari sisi pelaksanaannya, pelayanan publik telah diupayakan semaksimal mungkin. Apalagi saat sekarang ini telah diberlakukan pelayanan terpadu satu pintu yang dikenal dengan sebutan PTSP. Terkait pelayanan terpadu satu pintu ini, Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada KMA Nomor 90 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.

Kementerian Agama mempunyai kewajiban melaksanakan kepentingan pemerintah dibidang agama demi menyokong Pemimpin negara untuk menjalankan negara. Pada saat melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Agama diantaranya melaksanakan yang dimulai dari rumusan, ketetapan dan menjalankan kebijakan dibidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu, penyelenggaraan haji dan umrah, pendidikan agama dan keagamaan, serta melakukan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Pelayanan penyelenggaraan terpadu pada kementerian agama Kabupaten Tapanuli Tengah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan pada Kementerian Agama. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai waktu, tempat, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan. Sedangkan kepastian adalah kepastian hukum terhadap waktu, tempat, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian pengaduan pelayanan. Selanjutnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah ini, bertujuan untuk :

- a) meningkatkan kualitas pelayanan publik,
- b) memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan,
- c) memberikan jaminan kepastian hukum.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel. selain itu juga untuk meningkatkan hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk

menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kemenag, Sangat penting untuk merancang sistem untuk mengukur sejauh mana anggota masyarakat umum puas dengan layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan publik. Menurut prinsip manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai jika kualitas produk jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa sebanding dengan yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Maka dari itu, informasi perlu dikelola, tujuannya adalah untuk terus menghasilkan layanan yang konsisten dengan standar yang telah ditetapkan dan mempertahankan layanan tersebut sesuai dengan standar tersebut.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem pengelolaan pengaduan yang mampu secara efektif dan efisien mengubah berbagai pengaduan masyarakat menjadi masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Mengembangkan model pelayanan publik merupakan salah satu cara Kementerian Agama dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikannya secara keseluruhan, yang penting untuk diingat ketika mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Bahkan ada pelayanan publik yang dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pengelolaannya secara privat agar dapat memberikan hasil yang berkualitas.

Di antara berbagai model yang telah disajikan adalah sebagai berikut: *contracting out*, dalam hal pelayanan publik dilakukan oleh swasta melalui proses lelang, dan pemerintah berperan sebagai regulator; *waralaba*, dalam hal ini pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat memberikan pelayanan publik tertentu, diikuti dengan keteraturan harga untuk menetapkan harga maksimum; dan terakhir, *outsourcing*, dalam hal ini pelayanan publik dilakukan oleh pihak swasta melalui proses lelang; dan *outsourcing*, dalam hal pelayanan publik dilakukan oleh swasta melalui proses lelang. Maka dalam hal ini pengelolaan resiko sangat penting agar menjaga keberlangsungan pelayanan terhadap masyarakat oleh Kemenag Tapanuli Tengah.

Berdasarkan hal ini, manajemen resiko yang dilakukan di Kemenag Tapanuli Tengah tujuannya adalah berupaya untuk kepentingan membantu umat manusia. Keberhasilan pengelolaan risiko oleh manusia seringkali dapat menghasilkan peningkatan manfaat. Ada kemungkinan munculnya kemaslahatan ini dapat diartikan sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah.

Kemungkinan besar orang telah mampu membuat pilihan yang tepat meskipun ada ambiguitas dan bahaya sejak awal sejarah spesies kita. Ketergantungan manusia pada manusia lain untuk menjelaskan masa depan, seperti ketika manusia ingin mengetahui masa depan yang tidak pasti, maka manusia memprediksi masa depan dengan beberapa kemungkinan hasil, yang mengakibatkan ketergantungan manusia pada peramal, pendeta, pendeta, dan individu lainnya. Oleh karena itu, ada contoh dalam kehidupan manusia di mana manajemen risiko telah diterapkan. *Manajemen Islam Dalam Pengelolaan Resiko Terhadap Pelayanan Transparansi Publik di Kemenag Tapanuli Tengah*

Pada dasarnya penerepan manajemen risiko tidak jauh berbeda dengan lembaga lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa setiap kegiatan manajemen risiko melakukan manajemen risiko sendiri atau sebagian pada berbagai jenis dan sifat risiko yang muncul, meskipun diakui belum dilaksanakan secara formal dan belum mencapai sasaran. tingkat pembentukan kerangka sistem manajemen risiko dan struktur pengendalian internal yang terintegrasi dan komprehensif. Hal ini ditunjukkan karena setiap aktivitas manajemen risiko melakukan manajemen risiko secara mandiri atau sebagian atas berbagai jenis dan sifat risiko yang muncul. Oleh karena itu, kerangka manajemen risiko pada transfer informasi publik di Kementerian Agama Tapanuli Tengah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: (1) niat, (2) identifikasi risiko, (3) analisis dan penilaian/pengukuran risiko, (4) evaluasi dan tindakan risiko, dan (5) pemantauan risiko dan pelaporan risiko. Kementerian Agama Tapanuli Tengah saat ini sedang dalam proses penerapan manajemen risiko, dan niat inilah yang menjadi inti dari praktik tersebut. Karena haramnya segala sesuatu yang dilakukan dengan maksud lain selain mencari keridhaan Allah SWT dan memberikan kemaslahatan bagi diri sendiri dan orang lain dalam rangka membangun transfer informasi publik, sangat penting untuk ditempatkan pada tahap pertama.

Jika dibandingkan dengan kerangka manajemen risiko pada umumnya, kehadiran niat yang tulus dan ketabahan spiritual yang kuat menonjol sebagai pembeda utama, dan ini benar dari sudut pandang konvensional dan Islam. Beberapa informan yang berbeda dapat memberikan informasi mengenai keberadaan kekuatan spiritual dalam berbagai praktik manajemen risiko. Nilai-

nilai Islam, khususnya nilai-nilai instrumental yang hadir dalam manajemen risiko (termasuk Fathonah, Istiqomah, Amanah, dan Tawakal). Ada juga nilai-nilai Islam lainnya seperti akhlak, 'an taraadhin minkum, shiddiq, ikhlas, ukhuwah (persaudaraan), yang dikemas dalam persahabatan, dan ihsan. Penerapan akhlak dalam manajemen keislaman di Kementerian Agama Tapanuli Tengah adalah etika, yang menjadi pilar kekuatan bangunan Islam, meliputi: (1) tauhid, (2) keadilan, (3) kehendak bebas, yaitu diwujudkan dalam kebebasan mengeluarkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnis sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan (4) akuntabilitas diterapkan dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya agar tidak mengarah pada eksploitasi yang c. Penerapan akhlak dalam manajemen Islam pada titik inilah dimulainya konsepsi informasi yang terbuka dan jujur, guna memastikan Kementerian Agama mampu melanjutkan operasionalnya.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam sebuah organisasi sangat penting, dalam rangka mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko yang besar yang dapat merusak sebuah organisasi dalam mewujudkan visi misinya. Oleh karena itu, Sebuah organisasi yang melaksanakan manajemen risiko akan mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu ;

1. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua pegawai dan masyarakat,
2. Meningkatkan stabilitas kerja,
3. Terlindunginya organisasi atau instansi dari sebuah risiko yang dapat merugikan,
4. Memberikan proteksi untuk semua orang, tidak saja kepada pegawai tetapi juga masyarakat.

Transparansi informasi dalam pelayanan publik merupakan keniscayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan adanya pelayanan yang baik akan memberikan kesan baik pula terhadap organisasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Husein Umar, 2001, *Menejmen Risiko Bisnis, Pendekatan Finansial dan Non Finansial*, Gramedia Pustsaka Utama: Jakarta
- Mamduh M. Hanafi, 2006, *Menejemen Risiko*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Masyhud Ali, 2006, *Menejemen Risiko, Strategi Perbankan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Raja Grafindo: Jakarta
- Soeismo Djojosoedarso, 1999, *Prinsip-prinsip Menejemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat: Jakarta.
- Djalalludin, A. 2007. *Manajemen Qur'ani Menerjemahkan Idarah Ijahiyah dalam Kehidupan*. UIN Press: Malang.
- Djojosoedarso, S. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hasan, A. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fahmi, I. *Manajemen Risiko-Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Ghozali, I. *Manajemen Risiko Perbankan*. Semarang: BPUNDIP, 2007
- Muslich, Muhammad. *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hanafi, M. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2006.
- Karwati, Eius dan Priansa Donni. *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Pramana, Tony. *Manajemen Risiko Bisnis*, Sinar Ilmu Publishing, 2011
- Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan?, Policy Brief. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Atep Adya Brata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.